

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber penghasilannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat.

Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebi dengan adanya otomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang dinamakan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan daerah, yang diganti dengan PP nomor 58 Tahun 2005 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada daerah yang diganti dengan suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan unyuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah.

Anggaran pemerintah yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja manajerial, instansi pemerintah membuat penetapan kinerja manajerial secara berjenjang dengan tujuan untuk mewujudkan suatu capaian yang baik, melalui manajerial secara berjenjang dengan tujuan untuk mewujudkan suatu capaian yang baik, melalui penetapan target kinerja manajerial yang menggambarkan pencapaiannya baik berupa penghasilan maupun pemanfaatan.

Secara umum, kinerja diartikan sebagai suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam pelumasan skema strategi (strategic planing) suatu organisasi pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat dalam suatu periode.

Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Mahoney, 1963 dalam Dzillan 2010).

Wehrich dan Koontz (2005) dalam Nonce (2007) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja dalam mengerti dan memahami fungsi manajer dalam mencapai sasaran kerjanya yang diukur dari bagaimana manajer tersebut

menjalankan aktifitas manajerialnya seperti : *planning, organizing, staffing, leading* dan *controlling*. Kinerja manajerial satuan kerja prangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Sedarmayanti 2004).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial SKPD antara lain ketepatan skedul penyusunan anggaran, pengendalian intern, gaya kepemimpinan, dan struktur desentralisasi (Mulyadi 2001). Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada para manajer. Tingkat pendelegasian itu sendiri menunjukkan sampai seberapa jauh manajemen yang lebih tinggi mengizinkan manajemen yang lebih rendah untuk membuat kebijakan secara independen (Heller dan Yulk, 1989 dalam Marina 2009).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang

dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Desentralisasi dalam bentuk pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah diperlukan karenan semakin kompleksnya kondisi administratif, tugas, dan tanggung jawab. Dengan pendegalasian wewenang maka akan membantu meringankan beban manajemen yang lebih tinggi. Govindarajan (1989) dalam Marina (2009) menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi merupakan bentuk yang tepat untuk menunjang pencapaian kinerja manajerial yang lebih baik.

Desentralisasi dapat diartikan adanya pelimpahan sebagai wewenang dari pejabat terhadap pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terkait dengan alokasi sumber daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat. Menurut mardiasmo (2002) desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintan pusat ke pemerintah yang lebih luas tetapi juga pelimpahan bebrapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya dalam sistem negaea dan mengurus urusannya dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Dengan adanya desentralisasi, organisasi maupun mengembangkan kemampun yang dimiliki, bisa menangani peristiwa-peristiwa, bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong kinerha yang lebi baik. Selain

itu, sistem pengendalian intern pada pemerintah juga sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintah yang lebih baik. Sesuai mandat PP No. 60 tahun 2008 sistem pengendalian ini dikenal dengan sistem, intern pemerintah. Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif pengendalian internal entitas (Arens, 2008). Peraturan pemerintah No.8 tahun 2006 menyatakan bahwa apabila tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai maka dengan demikian akan meningkatkan kinerja manajerial.

Pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membuat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (COSO report 2008).

Menurut Mulyadi (2002) definisi pengendalian intern yaitu segala sesuatu yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian pengendalian intern meliputi :struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukaan dan laporan (Administrasi) budget dan standart pemeriksaan intern dan sebagainya.

Menurut PP No.8 Tahun 2006, sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi pendegelasan wewenang maka ajan membantu meringankan beban manajemen yang lebih tinggi. Govindarajan (1986) dalam marina (2009) menunjukkan bahwa tingka desentralisasi yang tinggi merupakan bentuk yang tepat untuk menunjang pencapaian kinerja manajerial yang lebih baik.

Desentralisasi dapat diartikan adanya pelimpahal sebagai wewenang dari pejabat terhadap pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terkait dengan alokasi sumber daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat (Miah dan Mia, 1996 dalam karyanti 2010). Menurut mardianso (2002) desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih luas tetapi juga pelimpahan pusat ke pemerintahan yang lebih luas tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Sedangkan menurut UU No.32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Dengan adanya desentralisasi, organisasi mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki, bisa menangani pristiwa-pristiwa, bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong ke kinerja yang lebih baik.

Selain itu, sistem pengendalian intern pada pemerintah juga sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintah yang lebih baik.sesuai mandap PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem

pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian intern entitas (Arens, 2008).peraturan pemerintah No.8 Tahun 2006 menyatakan bahwa apabila tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai maka dengan demikian akan meningkatkan kinerja manajerial.

Pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang di gunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong efisiensi, dan membantu dorongan di patuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Coso Report 2008).

Menurut Mulyadi (2002) defiisi pengendalian intern yaitu segala sesuatu yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian pengendalian intern meliputi :struktur organisasi,formulir-formulir dan prosedur pembukaan dan laporan (Administrasi), budget dan standar pemeriksaan intern dan sebagainya.

Menurut PP No.8 tahun 2006, sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian

laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Tuati 2007) tentang Pengaruh Desentralisasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Studi pada Pemerintah Kota Kupang. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan satu variabel independen yaitu akuntabilitas. Penelitian ini berjudul **Pengaruh Akuntabilitas, Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial SKPD kota Lubuklinggau.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD ?
2. Apakah desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja manajerial SKPD..
2. Pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial SKPD.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Akuntabilitas , Desentralisasi dan Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial satuan kerja pemerintah daerah kota Lubuklinggau.
2. Bagi Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini SKPD di Lubuklinggau dapat menjadi masukan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan memperhatikan pengaruh Akuntabilitas, Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kinerja manajerial satuan kerja pemerintah daerah Lubuklinggau
3. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian di bidang akuntansi pada masa yang akan datang.